

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL DI SMPN 24 KOTA SAMARINDA

Annirdiyani Putri Sitorus¹, Syahrani², Santi Rande³

Abstrak

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi, dan faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional di Smp Negeri 24 Kota Samarinda. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Sekolah sebagai key informan, dan informan nya yaitu Kepala Sekolah, Guru, Staf SMP Negeri 24 Kota Samarinda dan Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa dalam Implementasi Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional di Smp Negeri 24 Kota Samarinda masih belum terlaksana secara efektif, hal ini dikarenakan masih banyak kendala yang menghambat pelaksanaannya diantaranya yaitu masih banyaknya calon peserta ujian nasional yang kurang fokus dalam mengikuti sosialisasi pelaksanaan ujian nasional yang dilakukan oleh lembaga terkait sehingga masih diperlukan strategi yang lebih tepat lagi agar peserta sosialisasi bisa fokus dan paham terhadap materi yang disampaikan. Selain itu untuk sumberdaya manusia(staff pengajar) serta sumber daya modal(fasilitas) yang dimiliki SMPN 24 Kota Samarinda masih minim, hal ini dapat dilihat dari keterbatasan fasilitas ruangan dan komputer, serta staff pengajar yang masih belum menguasai sepenuhnya materi karena masih harus beradaptasi dengan kurikulum yang awalnya KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 2006 menjadi Kurikulum 2013.

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

Kata Kunci : Implementasi, Kriteria Kelulusan, Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh informasi mengenai beberapa permasalahan terkait implementasi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 tentang kriteria kelulusan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan ujian nasional di SMP 24 Kota Samarinda antara lain sebagai berikut:

Masih Kurangnya Kuantitas Ruang Ujian Ruang merupakan aspek yang sangat fundamental dalam mendukung kelancaran pelaksanaan ujian. Ketersediaan ruang yang memadai harus diwujudkan oleh setiap sekolah jika ingin pelaksanaan UNBK berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Namun di SMP 24 Kota Samarinda masih terjadi kesenjangan antara jumlah ruang (2ruangan) dengan jumlah siswa (195), jumlah siswa lebih banyak jika dibandingkan kapasitas ruang seperti yang telah disebutkan pada table 1.4 diatas sehingga menyebabkan ujian harus dilaksanakan menjadi 3 sesi, padahal jika ruang tersedia dengan kapasitas yang memadai pelaksanaan UNBK bias dilakukan secara serentak agar lebih efektif tanpa harus bergantian.

Ketersediaan Suplai Tegangan Listrik dan Jaringan Internet Ketersediaan suplai tegangan listrik dan jaringan internet merupakan hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan UNBK namun pada hari pertama pelaksanaan di SMPN 24 jaringan internet masih sempat terkendala sehingga mengganggu proses pelaksanaan UNBK oleh karena itu perlu perhatian yang serius dalam hal jaringan dikarenakan sistem ujian ini sudah menggunakan komputer maka harus benar-benar diperhatikan ketersediaan jaringan internet sehingga tidak mengganggu proses berjalannya UNBK di SMPN 24 Kota Samarinda.

Masih Kurangnya Ketersediaan Komputer Dalam pelaksanaan UNBK ketersediaan jumlah fasilitas komputer yang memadai sangatlah penting namun pada kenyataannya ketersediaan komputer yang ada di SMPN 24 Kota Samarinda masih belum memadai. Jadi, selain karena tidak seimbang antara jumlah ruang dengan siswa jumlah komputer juga masih kurang dan menyebabkan UNBK tidak bisa dilakukan serentak untuk para siswa sehingga harus dibagi beberapa sesi.

Masih Rendahnya Tingkat kelulusan siswa dalam pelaksanaan UNBK dibandingkan dengan ujian berbasis kertas tahun sebelumnya Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah melalui skripsi dengan “Implementasi Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari

Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional di Smp Negeri 24 Kota Samarinda”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional di Smp Negeri 24 Kota Samarinda?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional di Smp Negeri 24 Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional di Smp Negeri 24 Kota Samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional di Smp Negeri 24 Kota Samarinda.

TEORI DAN KONSEP

Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. Kebijakan menurut Anderson (dalam Winarno, 2011:21) merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita

nggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.

Pendidikan Nasional

Pendidikan Nasional merupakan pelaksanaan pendidikan suatu Negara berdasarkan sosio kultural, psikologis, ekonomis, dan politis. Pendidikan tersebut ditujukan untuk membentuk ciri khusus atau watak bangsa dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan watak atau pribadi bangsa, memajukan kehidupan bangsa dalam berbagai bidang kehidupannya, serta mencapai tujuan nasional bangsa yang bersangkutan, itulah yang disebut sistem pendidikan nasional (Hasbullah 2011:123).

Pengertian Ujian Nasional

Menurut H.A.R Tilaar (2006:24) Ujian Nasional adalah upaya pemerintah untuk mengevaluasi tingkat pendidikan secara Nasional dengan menetapkan standarisasi Nasional pendidikan. Hasil dari Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh negara adalah upaya pemetaan masalah pendidikan dalam rangka menyusun kebijakan pendidikan nasional.

Pengertian Ujian Nasional Berbasis Komputer atau Ujian Nasional Computer Based Test (CBT)

Menurut Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2015:5) Ujian Nasional Berbasis Komputer adalah salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan ujian nasional berbasis kertas. Selanjutnya Pusat Penilaian Pendidikan juga menjelaskan kelemahan dari ujian nasional berbasis kertas adalah sebagai berikut :“ujian nasional berbasis kertas mempunyai kelemahan, diantaranya: bentuk soal yang digunakan pada saat ujian sulit untuk dibuat bervariasi; tampilan soal terbatas; hanya dua dimensi; diperlukan banyak kertas dan biaya penggandaan yang cukup besar; pengamanan kerahasiaan soal relatif sulit dan memerlukan biaya cukup besar; pengelolaan hasil memerlukan waktu yang relatif lama”.

Definisi Konsepsional

Berkenaan dengan judul penelitian ini maka definisi konsepsional yang merupakan pembatasan terhadap penelitian yang dilakukan yakni sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional di Smp Negeri 24 Kota Samarinda adalah pelaksanaan kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengungkap tentang implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer

atau Computer Based Test (CBT) di SMP Negeri 24 Kota Samarinda. Proses implementasi disini peneliti mengarahkan atau memfokuskan implementasi pada proses pengelolaan penyelenggaraannya di SMP Negeri 24 Kota Samarinda yang ditinjau dari variabel komunikasi, variabel sumberdaya, variabel disposisi, dan variabel struktur birokrasi beserta faktor penghambat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer di SMP Negeri 24 Kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena peneliti bermaksud untuk menentukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran yang mendalam tentang Implementasi Peraturan Menteri nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional di SMP Negeri 24 Kota Samarinda.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Menteri nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional di SMP Negeri 24 Kota Samarinda banyak memiliki indikator yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan menurut Edwards antara lain :
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrasi
2. Faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional di SMP Negeri 24 Kota Samarinda.

Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Purposive Sampling, pemilihan kelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat tertentu dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan cirri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Menurut Sugiyono (2013: 53-54) Purposive Sampling adalah teknik menentukan subyek/obyek sesuai tujuan, teknik sampling ini digunakan dengan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subyek/obyek sebagai unit analisis yang

berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representative. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Kota Samarinda. Dan Informannya adalah Wakil Kepala Sekolah, guru, Staf SMP Negeri 24 Kota Samarinda dan Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data sangat dibutuhkan, karena tanpa teknik pengumpulan data maka tidak dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan proposal ini dengan membaca literature-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan proposal ini.
- 2) Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut :
 - a. Observasi yaitu teknik yang digunakan untuk menggali data dari sumber data berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar.
 - b. Wawancara sebagai pelengkap dan pendukung serta pembanding dengan data dan informasi yang diperoleh.
 - c. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data sangat diperlukan untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bias dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Didalam analisis data kualitatif terdapat empat kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu : pengumpulan data (*Data Collection*) Kondensasi data (*Data Condensation*), penyajian data (*Data Display*), penarikan kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verifying*), (dalam Miles, Huberman dan Saldana 2014: 31-33). analisis data beserta keterangannya, sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

SMP Negeri 24 Kota Samarinda merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.

Seperti SMP pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMPN 24 Kota Samarinda ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari kelas VII sampai kelas IX. Sekolah ini memiliki 1 gedung berisi 18 ruang kelas. Gedung-gedungnya bukan hanya untuk ruang kelas dan ruang olahraga, tetapi juga terdapat fasilitas mushalla.

Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan ujian nasional di SMPN 24 Kota Samarinda

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan ujian nasional di SMPN 24 Kota Samarinda maka penulis melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah, di SMPN 24 Kota Samarinda sebagai key informan dan Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Staff sebagai informan. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut

a. Komunikasi

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjalin dengan calon peserta ujian nasional kurang berjalan dengan baik, hal ini terlihat pada saat dilakukannya sosialisasi ujian nasional tersebut para peserta sosialisasi masih ada yang kurang fokus dalam mendengarkan materi sosialisasi yang disampaikan.

Dari beberapa pernyataan dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pihak terkait terjalin dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini bisa dilihat dari kerjasama yang dilakukan oleh pihak airlangga dan primagama dalam sosialisasi serta penyediaan fasilitas komputer dalam mendukung pelaksanaan ujian nasional berjalan secara maksimal. Namun masih diperlukan strategi yang lebih baik lagi agar peserta sosialisasi bisa fokus dan mampu memahami materi sosialisasi yang disampaikan

b. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sumberdaya merupakan hal-hal yang penting dalam mendukung kegiatan suatu organisasi, salah satunya yaitu dalam pelaksanaan ujian nasional di SMPN 24 Kota Samarinda. Dalam pelaksanaan ujian nasional Untuk saat ini masih menengah dalam arti belum 100% dari pendidik dan juga staffnya (sumberdaya manusianya) karena penggunaan kurikulum ini masih bertahap sehingga masih perlu persiapan yang lebih matang bagi guru-guru yang ada di SMPN 24 Kota Samarinda.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada staff bidang tata usaha yaitu ibu Ulfa Hani yang menyatakan bahwa : “Menegenai sumberdaya manusia (guru,pengawas dan pengajar) saya rasa sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing dan untuk sumberdaya modal (sarana dan prasarana) pun juga sudah cukup memadai. (Wawancara, 23 Juli 2018)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sumberdaya manusia sudah sesuai dan sumberdaya modalnya juga sudah memadai.

Jadi dari wawancara disimpulkan bahwa pihak sekolah telah mengusulkan kepada pemerintah mengenai sarana dan prasarana (sumberdaya modal) yang kurang disekolah tersebut.Namun pada kenyataanya realisasi dari pemerintah masih belum terlaksana dan sumberdaya manusia serta sumberdaya modal masih belum optimal.Hal ini dapat dilihat dari fasilitas yang masih kurang serta pendidik dan staff masih belum menguasai materi secara sepenuhnya.

Kemudian dalam pelaksanaan ujian nasional belum 100% dari pendidik dan juga staffnya (sumberdaya manusianya) menguasai materi karena penggunaan kurikulum ini masih bertahap sehingga masih perlu persiapan yang lebih matang bagi guru-guru yang ada di SMPN 24 Kota Samarinda.

c. Disposisi

dari wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di SMPN 24 Samarinda telah terdisposisi dengan baik, para panitia pengawas ujian nasional dan peserta ujianpun telah bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajibannya.

d. Struktur Birokrasi

Jadi dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi di SMPN 24 Samarinda sudah baik karena sudah berpatokan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis (juknis). Teknis pelaksanaannya juga dilakukan secara bersamaan sehingga pihak yang bersangkutan selalu bekerjasama, lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan ujian nasional tersebut telah berupaya melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya sehingga mampu mendukung proses terselenggaranya ujian nasional dengan baik.

e. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional di SMPN 4 Kota Samarinda

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh SMPN 24 Kota Samarinda, dalam pelaksanaan ujian nasional berbasisi komputer ini yaitu: Kurangnya sarana dan prasarana (kurangnya komputer), keterbatasan ruang ujian yang disebabkan

minimnya penyediaan komputer, jaringan internet, Tenaga ahli yang belum mencukupi dalam penanganan masalah-masalah pada perangkat komputer jika sewaktu-waktu dalam menyelesaikan ujian nasional berbasis komputer terjadi masalah.

Pembahasan

Pembahasan ini akan diulas secara sistematis dengan menghubungkan fakta satu dengan fakta lainnya agar pada akhirnya pembahasan akan dihasilkan kesimpulan yang singkat padat dan jelas.

Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan yang merupakan suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang) dan mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Begitupun dengan kebijakan pemerintah mengenai peraturan ujian nasional harus di implementasikan dengan baik sesuai arah kebijakan sehingga hasil dari implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan harapan. Guna mengetahui Implementasi Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan ujian nasional di SMPN 24 Kota Samarinda maka dapat dilihat dari variabel-variabel yang mempengaruhinya. Dengan menggunkan variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang di Implementasi Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan ujian nasional di SMPN 24 Kota Samarinda pada ujian nasional berbasis komputer diharapkan dapat efektif. Dari variabel-variabel tersebut dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Komunikasi, implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab mencapai tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Dengan demikian penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Begitu juga dalam penelitian ini, dalam Implementasi Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik

dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan ujian nasional di SMPN 24 Kota Samarinda memerlukan komunikasi yang baik sehingga semua pelaksana kebijakan ujian nasional memahami aturan, tugas maupun wewenang yang dimiliki oleh masing-masing unsur pelaksana. Oleh karena itu sosialisasi terhadap pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer sangat lah penting dilakukan. Akan tetapi di SMPN 24 Kota Samarinda ini sosialisasi dalam pelaksanaan Ujian Nasional yang dilaksanakan masih belum berjalan dengan optimal karena pada kenyataannya masih banyak siswa yang kurang paham dan kurang fokus dalam penyampaian materi dalam sosialisasi. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih baik lagi agar sosialisasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus transmigrasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mempengaruhi distorsi implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi yang disampaikan kepada kelompok sasaran, yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada pihak sekolah dua atau tiga bulan sebelum ujian nasional dilaksanakan, agar pelaksanaan ujian nasional tersebut nantinya berjalan dengan maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan dengan efektif terbukti, calon peserta ujian yang akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer telah memahami prosedur yang ada.

Sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi suatu kebijakan. Indikator yang bisa dilihat untuk mengetahui sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan didalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di Smp Negeri 24 Kota Samarinda antara lain yaitu bisa dilihat dari indikator Staf, Informasi, Fasilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan ujian nasional di SMPN 24 Kota Samarinda keadaan sumber daya masih kurang memadai seperti sumber daya modal berupa fasilitas atau sarana prasarana yang masih minim karena masih adanya keterbatasan ruang ujian, jaringan internet serta fasilitas komputer yang sampai dengan saat ini juga belum terealisasi dari pihak pemerintah. Selain itu Dalam penerapan kurikulum 2013 ini para sumber daya pengajar masih belum menguasai sepenuhnya materi, karena masih perlu adaptasi baru dari kurikulum KTSP 2006 mejadi kurikulum 2013. Jadi sumber daya pengajar yang kapabel dan kompeten juga sangat diperlukan sehingga dalm pelaksanaan ujian nasional berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Informasi juga ikut berperan dalam efektivitas pelaksanaan ujian nasional baik itu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan

kebijakan maupun informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan

Disposisi atau sikap, salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap implementor terhadap kebijakan: kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan atau program. Apabila implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan ujian nasional di SMPN 24 Kota Samarinda tidak akan berjalan efektif, akan tetapi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisinya telah berjalan dengan baik terbukti dengan Para panitia pengawas ujian telah menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya dengan sebagaimana mestinya. Peserta ujian nasional pun telah mengikuti tata tertib yang berlaku pada saat ujian nasional dilaksanakan. Variabel disposisi yang dimiliki oleh implementor sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan ujian nasional di SMPN 24 Kota Samarinda. Apabila implementor memiliki sikap atau prespektif yang baik maka proses implementasi akan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawas dan tenaga pengajar memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dengan baik. Terbukti dari semua jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer dan yang tidak lulus hanya siswa yang tidak mengikuti ujian nasional tanpa adanya keterangan yang diberikan kepada pihak sekolah.

Membahas badan suatu kebijakan tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah, karakteristik, norma-norma dan

pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi dalam mengimplementasikan Implementasi Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan ujian nasional di SMPN 24 Kota Samarinda itu sangat mempunyai pengaruh yang besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan pelaksanaan ujian nasional di SMPN 24 ini, mengacu pada prosedur operasi yang standar (Standart Operating Procedure/SOP). Setiap ada pelaksanaan kegiatan selalu diawali dengan pembuatan buku panduan sebagai pedoman pelaksanaan dan penerbitan surat keputusan personil dalam kegiatan.

Dari sejumlah hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan ujian nasional di SMPN 24 Kota Samarinda sudah dijalankan sebagaimana mestinya, namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara efektif karena masih terdapat kendala seperti sosialisasi pelaksanaan ujian yang masih belum optimal, sumber daya modal yang masih minim yaitu keterbatasan ruangan, komputer yang kurang memadai serta sumber daya manusia seperti tenaga pendidik dan staff yang belum menguasai sepenuhnya materi, karena masih perlu adaptasi baru dari kurikulum KTSP 2006 mejadi kurikulum 2013.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai Implementasi Peraturan Menteri nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional di SMP Negeri 24 Kota Samarinda, maka pada bab ini dapat diambil garis besar sebagai berikut :

1. Komunikasi antar pihak terjalin dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini bisa dilihat dari kerjasama yang dilakukan oleh pihak airlangga dan primagama dalam sosialisasi dengan serta penyediaan fasilitas komputer dalam mendukung pelaksanaan ujian nasional berjalan secara maksimal. Namun masih diperlukan strategi yang lebih baik lagi agar peserta sosialisasi bisa fokus dan mampu memahami materi sosialisasi yang disampaikan.
2. Pihak sekolah telah mengusulkan kepada pemerintah mengenai sarana dan prasarana (sumberdaya modal) yang kurang disekolah tersebut. Namun pada kenyataannya realisasi dari pemerintah masih belum terlaksana dan sumberdaya manusia serta sumberdaya modal masih belum optimal. Hal

ini dapat dilihat dari fasilitas yang masih kurang serta pendidik dan staff masih belum menguasai materi secara sepenuhnya. Kemudian dalam pelaksanaan ujian nasional belum 100% dari pendidik dan juga staffnya (sumberdaya manusianya) menguasai materi karena penggunaan kurikulum ini masih bertahap sehingga masih perlu persiapan yang lebih matang bagi guru-guru yang ada di SMPN 24 Kota Samarinda.

3. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di SMPN 24 Kota Samarinda telah terdisposisi dengan baik, para panitia pengawas ujian nasional dan peserta ujian pun telah bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajiban.
4. Struktur birokrasi di SMPN 24 Kota Samarinda sudah baik karena sudah berpatokan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis (juknis). Teknis pelaksanaannya juga dilakukan secara bersamaan sehingga pihak yang bersangkutan selalu bekerjasama, lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan ujian nasional tersebut telah berupaya melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya sehingga mampu mendukung proses terselenggaranya ujian nasional berbasis komputer dengan baik.

Sedangkan hambatan yang ditemui dalam menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer di SMP Negeri 24 Kota Samarinda adalah seperti sumber daya modal yaitu keterbatasan ruangan, komputer yang kurang memadai serta sumber daya manusia seperti tenaga pendidik dan staff yang belum menguasai sepenuhnya materi, Karena masih perlu adaptasi baru dari kurikulum KTSP 2006 menjadi Kurikulum 2013.

Saran

1. Diharapkan pihak pemerintah agar lebih tanggap dan serius dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang ada agar kedepannya lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu sumber daya manusia tenaga pengajar harus lebih memiliki kinerja yang lebih profesional supaya lebih cepat beradaptasi dengan kurikulum baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Seharusnya diperlukan implementor yang bisa mengkomunikasikan dengan kelompok sasaran, sumberdaya yang memadai, serta disposisi yang baik dan struktur birokrasi yang mengacu pada prosedur operasi yang standar (*Standart Operasional Procedure/SOP*).
3. Perlu adanya pembinaan kepada para implementor (guru, pengawas maupun calon peserta ujian nasional berbasis komputer) kebijakan agar dalam penyelenggaraan ujian nasional komputer berbasis komputer dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan serta berhasil guna.
4. Melakukan monitoring terhadap siswa alumni SMP Negeri 24 Kota Samarinda yang telah lulus dalam rangka evaluasi hasil ujian nasional

berbasis komputer sebagai dasar kebijakan yang lebih baik untuk kedepannya.

5. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah dengan pihak sekolah guna menjalin kerjasama, baik dalam pelaksanaan ujian nasional maupun penyediaan sarana pendukung kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Pancur Siwah.
- Agustinus, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2015. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Dunn, William N. 2003. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama.
- Hasbullah. 2011. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lubis, 2007. Kebijakan Publik. Mandar Maju. Bandung.
- Miles, B. Matthew, dan Michael A Huberman, dan Johny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis-Third Edition. London: Sage Publication Ltd.
- Nugroho D, Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang, PT. Alex Media Komputerindo, Jakarta.
- _____. 2009. Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang, PT. Alex Media Komputerindo, Jakarta.
- Nyimas Dwi Koryati;dkk. 2004. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. YPAPI : Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung :Alfabeta.
- Sulila. Ismed. 2015. Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah. Deepublish: yogyakarta.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Tilaar, H.A.R, 2006. Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. 2010. Kebijakan Publik, (teori, proses dan studi kasus). CAPS, Yogyakarta.
- _____. 2011. Kebijakan Publik, (teori, proses dan studi kasus). CAPS, Yogyakarta.
- _____. 2012. Kebijakan Publik, (teori, proses dan studi kasus). CAPS, Yogyakarta.